

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Organisasi Nirlaba

2.1.1. Pengertian Organisasi Nirlaba

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018) dalam ISAK No.35 disebutkan bahwa “Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan”. Sedangkan menurut Tinungki dan Pusung (2014), organisasi nirlaba atau organisasi *non-profit* adalah suatu organisasi yang besaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan dengan memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat tanpa memiliki maksud untuk mendapatkan laba atau keuntungan.

2.1.2 Karakteristik Organisasi Nirlaba

Karakteristik entitas berorientasi nirlaba berbeda dengan entitas yang berorientasi laba. Perbedaan utama yang mendasar antara entitas berorientasi nirlaba dengan entitas yang berorientasi laba yaitu dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan dalam melakukan aktivitas operasinya. Entitas berorientasi nirlaba mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

Dalam ruang lingkup ISAK No.35 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018) dijelaskan bahwa suatu organisasi harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Sumber daya entitas berorientasi non-laba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan menumpuk laba, dan jika entitas berorientasi non-laba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas berorientasi nonlaba tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis berorientasi laba, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas berorientasi nonlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas berorientasi non-laba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas berorientasi non-laba.

Tabel 2. 1

Perbedaan Karakteristik Organisasi Nirlaba dengan Organisasi Komersial

<i>Not- For- Profit Entity</i>	<i>Commercial Business Enterprises</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima kontribusi sumber dana dalam jumlah signifikan dari pemberi dana yang tidak mengharapkan pengembalian 2. Beroperasi untuk menghasilkan barang dan jasa yang bukan untuk mencari laba 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi dana adalah pemilik atau kreditor yang mempunyai kepentingan untuk memiliki atau pengembalian tambah keuntungan atau bunga. 2. Menghasilkan barang dan jasa menghasilkan laba. 3. Pemberi dana mempunyai kepentingan utk memiliki atau pengembalian dana.

3. Pemberi dana tidak mempunyai kepentingan terhadap organisasi.	
--	--

Sumber: (Andarsari, 2017)

2.2 Yayasan

Yayasan merupakan badan hukum yang kekayaannya dipisahkan dan diperuntukan untuk bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dari definisi tersebut jelas bahwa sebuah yayasan dibentuk harus berbadan hukum serta memiliki tujuan dalam bentuk kegiatan di bidang sosial, keagamaan atau kemanusiaan dan bukan untuk mendapatkan keuntungan.

2.3. Panti Asuhan

2.3.1. Pengertian Panti Asuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan panti asuhan sebagai rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim atau piatu dan sebagainya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa panti asuhan adalah sebuah lembaga atau organisasi nirlaba yang aktivitas organisasinya dibidang kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial kepada anak-anak asuhnya.

2.3.2. Tujuan Panti Asuhan

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia, Tujuan Panti Asuhan sebagai berikut:

1. Panti asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka kearah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat.
2. Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak panti asuhan adalah terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya.

Dari dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa panti asuhan memiliki tujuan dalam memberikan pelayanan, bimbingan, dan keterampilan serta membentuk karakter agar anak-anak panti asuhan dapat menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara serta mereka dapat menggapai cita-cita yang ingin mereka capai nantinya.

2.3.3. Fungsi Panti Asuhan

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia, panti asuhan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak.

2. Sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.
3. Sebagai pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan fungsi penunjang).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari panti asuhan adalah untuk memberikan pelayanan, informasi, bimbingan, dan pengembangan keterampilan bagi kesejahteraan sosial anak.

2.4. Standar Akuntansi Keuangan

Menurut Arifin (2014), standar akuntansi keuangan diterbitkan karena adanya:

1. Melengkapi pemakaian informasi akuntansi dengan informasi akuntansi dengan informasi tentang posisi keuangan, prestasi dan pelaksanaan dari suatu perusahaan. Informasi akuntansi harus jelas, konsisten, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan.
2. Melengkapi para akuntan publik dengan pedoman dan aturan-aturan tindakan agar memungkinkan mereka menjalankan ketelitian kebebasan dalam menjual keahliannya dan integritas laporan-laporan kantor akuntan dalam membuktikan keabsahan laporan ini.
3. Menyediakan pemerintah sebagai sumber data untuk berbagai variabel dianggap esensial untuk menjalankan perpajakan, pengaturan perusahaan perencanaan dan pengaturan ekonomi, peningkatan efisiensi ekonomi, dan sasaran lainnya.

4. Membangkitkan minat terhadap prinsip-prinsip, teori-teori diantara seluruh jajaran yang berkepentingan dalam disiplin akuntansi ataupun sekedar menyebarluaskan suatu standar akan membangkitkan banyak kontroversi dan debat dalam praktik dan akademi.

Menurut Arifin (2014), terdapat empat hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi keuangan, antara lain:

1. Pengakuan unsur laporan keuangan.
2. Definisi elemen dan pos laporan keuangan.
3. Pengukuran unsur laporan keuangan.
4. Pengungkapan atau penyajian informasi dalam laporan keuangan.

Proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan oleh neraca atau laba rugi disebut pengakuan. Pengakuan ini dilakukan dengan cara menyatakan pos dengan kata-kata atau jumlah uang, maka melalui pengakuan suatu transaksi dapat dilihat apakah telah dicatat (dijurnal) atau tidak. Secara signifikan pengakuan terlihat dalam akun-akun laba rugi dan laba komprehensif. Untuk mengakui pos tersebut harus memenuhi definisi suatu unsur, yakni:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan.
2. Pos tersebut dapat diukur dengan andal nilai atau biayanya.

2.5. Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 1, par 09), laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur

dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi yang berhubungan dengan entitas yang meliputi:

1. Aset;
2. Liabilitas;
3. Ekuitas;
4. Penghasilan dan beban (termasuk keuntungan dan kerugian);
5. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
6. Arus kas.

Informasi tersebut beserta informasi lainnya, yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan entitas, khususnya menggambarkan kondisi keuangan, serta hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang biasa dikenal adalah Neraca serta Laporan Laba/Rugi, atau hasil usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Posisi Keuangan. Laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan (Harahap, 2015).

2.6. ISAK No. 35 tentang Laporan Keuangan Entitas Nonlaba

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 terkait dengan pelaporan keuangan organisasi nonlaba diganti dengan ISAK (Interpretasi standar akuntansi keuangan) No.35 tentang penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non-laba (berlaku efektif 1 Januari 2020) menjelaskan tujuan utama dari laporan keuangan organisasi non-laba yakni menyajikan informasi yang relevan atas kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Istilah *not for profit*, semula terdapat pada PSAK No.45 kemudian diubah oleh DSAK IAI dalam ISAK No.35 menjadi non-laba dengan dasar asumsi bahwa sesungguhnya aktivitas utamanya tidak berorientasi untuk mencari laba, namun bukan berarti tidak menghasilkan laba (nirlaba).

ISAK No.35 mengatur terkait penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. ISAK No.35 yang diterbitkan oleh DSAK IAI merupakan interpretasi dari PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 05 yang memberikan contoh entitas berorientasi non-laba menjadi penyesuaian baik: (a) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk hubungan dua arah antara masyarakat dan pos tertentu dalam laporan keuangan, dan (b) penyesuaian deskripsi yang diterapkan untuk laporan keuangan itu sendiri. ISAK No.35 juga dilengkapi dengan contoh ilustratif serta dasar kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari ISAK No.35.

Menurut ISAK No.35 dalam Yanuarisa (2020), laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba meliputi laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan juga catatan atas

laporan keuangan. Adapun komponen laporan keuangan entitas non-laba berdasarkan ISAK No.35 terdiri atas:

1. Laporan Posisi Keuangan

Ada dua format Laporan Posisi Keuangan yang tersaji sebagai contoh berdasarkan ISAK No.35 yaitu sebagai berikut:

- a. Format A menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri sebagai bagian dari aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Akan tetapi, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya.

Contoh Laporan Posisi Keuangan (Format A)

ENTITAS XYZ		
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
ASET		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	XXXX	XXXX
Piutang bunga	XXXX	XXXX
Investasi jangka pendek	XXXX	XXXX
Aset lancar lain	XXXX	XXXX
Total Aset Lancar	XXXX	XXXX
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti investasi	XXXX	XXXX
Investasi jangka panjang	XXXX	XXXX
Aset tetap	XXXX	XXXX
Total Aset Tidak Lancar	XXXX	XXXX
TOTAL ASET	XXXX	XXXX
LIABILITAS		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Pendapatan diterima di muka	XXXX	XXXX
Utang jangka pendek	XXXX	XXXX
Total Liabilitas Jangka Pendek	XXXX	XXXX
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>		
Utang jangka panjang	XXXX	XXXX
Liabilitas imbalan kerja	XXXX	XXXX
Total Liabilitas Jangka Panjang	XXXX	XXXX
Total Liabilitas	XXXX	XXXX
ASET NETO		
<i>Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya</i>		
Surplus akumulasian	XXXX	XXXX
Penghasilan komprehensif lain ^{*)}	XXXX	XXXX
<i>Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)</i>		
Total Aset Neto	XXXX	XXXX
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	XXXX	XXXX

^{*)} entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya (misalnya, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

^(A) Lihat Laporan Perubahan Aset Neto.

Gambar 2. 1 Format A Laporan Posisi Keuangan

- b. Format B tidak menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri.

Contoh Laporan Posisi Keuangan (Format B)

ENTITAS XYZ		
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2		
<i>(dalam jutaan rupiah)</i>		
	20X2	20X1
ASET		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	XXXX	XXXX
Piutang bunga	XXXX	XXXX
Investasi jangka pendek	XXXX	XXXX
Aset lancar lain	XXXX	XXXX
Total Aset Lancar	XXXX	XXXX
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti investasi	XXXX	XXXX
Investasi jangka panjang	XXXX	XXXX
Aset tetap	XXXX	XXXX
Total Aset Tidak Lancar	XXXX	XXXX
TOTAL ASET	XXXX	XXXX
LIABILITAS		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Pendapatan diterima di muka	XXXX	XXXX
Utang jangka pendek	XXXX	XXXX
Total Liabilitas Jangka Pendek	XXXX	XXXX
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>		
Utang jangka panjang	XXXX	XXXX
Liabilitas imbalan kerja	XXXX	XXXX
Total Liabilitas Jangka Panjang	XXXX	XXXX
Total Liabilitas	XXXX	XXXX
ASET NETO		
<i>Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya**</i>	XXXX	XXXX
<i>Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)</i>	XXXX	XXXX
Total Aset Neto	XXXX	XXXX
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	XXXX	XXXX

(B)

***) mencakup jumlah penghasilan komprehensif lain (entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya, misalnya, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

(B) Lihat Laporan Perubahan Aset Neto.

Gambar 2. 2 Format B Laporan Posisi Keuangan

2. Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan penghasilan komprehensif memberikan informasi mengenai pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan oleh panti asuhan dalam periode tertentu. Ada 2 (dua) format Laporan Penghasilan Komprehensif yang disajikan sebagai berikut:

- a. Format A menyajikan informasi dalam bentuk kolom tunggal.

Format A ini memudahkan penyusunan laporan secara komparatif

Contoh Laporan Penghasilan Komprehensif (Format A)

ENTITAS XYZ Laporan Penghasilan Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER		
DAYA		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan	XXXX	XXXX
Jasa layanan	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka pendek (catatan D)	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	XXXX	XXXX
Lain-lain	XXXX	XXXX
Total Pendapatan	XXXX	XXXX
<i>Beban</i>		
Gaji, upah	XXXX	XXXX
Jasa dan profesional	XXXX	XXXX
Administratif	XXXX	XXXX
Depresiasi	XXXX	XXXX
Bunga	XXXX	XXXX
Lain-lain	XXXX	XXXX
Total Beban (catatan E)	XXXX	XXXX
Kerugian akibat kebakaran	XXXX	XXXX
Total Beban	XXXX	XXXX
Surplus (Defisit)	XXXX	XXXX
DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER		
DAYA		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	XXXX	XXXX
Total Pendapatan	XXXX	XXXX
<i>Beban</i>		
Kerugian akibat kebakaran	XXXX	XXXX
Surplus (Defisit)	XXXX	XXXX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
	XXXX	XXXX
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	XXXX	XXXX

Gambar 2. 3 Format A Laporan Penghasilan Komprehensif

- b. Format B menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto.

Contoh Laporan Penghasilan Komprehensif (Format B)

ENTITAS XYZ						
Laporan Penghasilan Komprehensif						
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2						
(dalam jutaan rupiah)						
	20X2			20X1		
	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Jumlah	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Jumlah
PENDAPATAN						
Sumbangan	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Jasa layanan	XXXX	-	XXXX	XXXX	-	XXXX
Penghasilan investasi jangka pendek (catatan D)	XXXX	-	XXXX	XXXX	-	XXXX
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Lain-lain	XXXX	-	XXXX	XXXX	-	XXXX
Total Pendapatan	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
BEBAN						
Gaji, upah	XXXX	-	XXXX	XXXX	-	XXXX
Jasa dan profesional	XXXX	-	XXXX	XXXX	-	XXXX
Administratif	XXXX	-	XXXX	XXXX	-	XXXX
Depresiasi	XXXX	-	XXXX	XXXX	-	XXXX
Bunga	XXXX	-	XXXX	XXXX	-	XXXX
Lain-lain	XXXX	-	XXXX	XXXX	-	XXXX
Total Beban (catatan E)	XXXX	-	XXXX	XXXX	-	XXXX
Kerugian akibat kebakaran	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Total Beban	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Surplus (Defisit)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						
	XXXX	-	XXXX	XXXX	-	XXXX
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Gambar 2. 4 Format B Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan Penghasilan Komprehensif DSAK (2019) menyebut istilah “penghasil komprehensif” untuk menunjukkan jumlah surplus (defisit) dan penghasilan komprehensif lain.

3. Laporan Perubahan Aset Neto

Laporan perubahan aset neto merupakan aktivitas tercermin pada aset neto atau ekuitas dalam posisi keuangan yang pencatatannya terbagi menjadi dua yaitu aset neto tanpa pembatas dan dengan pembatas.

Contoh Laporan Perubahan Aset Neto

ENTITAS XYZ		
Laporan Perubahan Aset Neto		
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	xxxx	xxxx
Surplus tahun berjalan	xxxx	xxxx
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	xxxx	xxxx
Saldo akhir	xxxx	xxxx
Penghasilan Komprehensif Lain		
Saldo awal	xxxx	xxxx
Peghasilan komprehensif tahun berjalan***)	xxxx	xxxx
Saldo akhir	xxxx	xxxx
Total	xxxx	xxxx
ASET NETO DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	xxxx	xxxx
Surplus tahun berjalan	xxxx	xxxx
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	(xxxx)	(xxxx)
Saldo akhir	xxxx	xxxx
TOTAL ASET NETO	xxxx	xxxx

***) entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya (misalnya jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

- (A) Lihat Laporan Posisi Keuangan (Format A).
 (B) Lihat Laporan Posisi Keuangan (Format B).

Gambar 2. 5 Format Laporan Perubahan Aset Neto

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas bertujuan memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode tertentu serta untuk menilai kemampuan panti asuhan dalam mengelola kas yang diterima dari donatur. Ada 2 metode pencatatan arus kas, berikut ini adalah contoh format laporan arus kas:

a. Metode langsung

Contoh Laporan Arus Kas (Metode Langsung)

ENTITAS XYZ		
Laporan Arus Kas		
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
AKTIVITAS OPERASI		
Kas dari sumbangan	xxxx	xxxx
Kas dari pendapatan jasa	xxxx	xxxx
Bunga yang diterima	xxxx	xxxx
Penerimaan lain-lain	xxxx	xxxx
Bunga yang dibayarkan	xxxx	xxxx
Kas yang dibayarkan kepada karyawan	xxxx	xxxx
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
AKTIVITAS INVESTASI		
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	xxxx	xxxx
Pembelian peralatan	(xxxx)	(xxxx)
Penerimaan dari penjualan investasi	xxxx	xxxx
Pembelian investasi	(xxxx)	(xxxx)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</i>	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
AKTIVITAS PENDANAAN		
<i>Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk:</i>		
Investasi dalam dana abadi (<i>endowment</i>)	xxxx	xxxx
Investasi bangunan	xxxx	xxxx
	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<i>Aktivitas pendanaan lain:</i>		
Bunga dibatasi untuk reinvestasi	xxxx	xxxx
Pembayaran liabilitas jangka panjang	(xxxx)	(xxxx)
	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</i>	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>

Gambar 2. 6 Format Laporan Arus Kas Metode Langsung

b. Metode tidak langsung

Contoh Laporan Arus Kas (Metode Tidak Langsung)

ENTITAS XYZ		
Laporan Arus Kas		
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
AKTIVITAS OPERASI		
Rekonsiliasi surplus (defisit) menjadi kas neto dari aktivitas operasi:		
Surplus	xxxx	xxxx
Penyesuaian untuk:		
Depresiasi	xxxx	xxxx
Penurunan piutang bunga	xxxx	xxxx
Penurunan dalam utang jangka pendek	xxxx	xxxx
Penurunan dalam pendapatan diterima di muka	xxxx	xxxx
Kas neto dari aktivitas operasi	xxxx	xxxx
AKTIVITAS INVESTASI		
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	xxxx	xxxx
Pembelian peralatan	(xxxx)	(xxxx)
Penerimaan dari penjualan investasi	xxxx	xxxx
Pembelian investasi	(xxxx)	(xxxx)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(xxxx)	(xxxx)
AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari sumbangan dibatasi untuk:		
Investasi dalam dana abadi (endowment)	xxxx	xxxx
Investasi dalam bangunan	xxxx	xxxx
	xxxx	xxxx
Aktivitas pendanaan lain:		
Bunga yang dibatasi untuk reinvestasi	xxxx	xxxx
Pembayaran liabilitas jangka panjang	(xxxx)	(xxxx)
	(xxxx)	(xxxx)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(xxxx)	(xxxx)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	xxxx	xxxx
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	xxxx	xxxx
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	xxxx	xxxx

Gambar 2. 7 Format Laporan Arus Kas Metode Tidak Langsung

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan-laporan di atas. Catatan atas laporan keuangan (CaLK) bertujuan memberikan informasi tambahan yang lebih rinci mengenai perkiraan-perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan. CaLK

disajikan secara sistematis sesuai urutan penyajian dari komponen utama laporan keuangan. Informasi yang terdapat pada catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas baik dengan penjelasan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. CaLK sangat penting dalam laporan keuangan entitas nonlaba karena menjelaskan tentang gambaran umum dari entitas tersebut.

2.7. Perbedaan PSAK 45 dan ISAK 35

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45

- a. Menjelaskan tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba, kata “*Not For Profit*” diterjemahkan sebagai nirlaba
- b. Aset neto dibagi menjadi 3 yaitu aset neto tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen
- c. Informasi mengenai pendapatan dikurangi beban sama dengan surplus atau defisit disebut Laporan Aktivitas
- d. Jenis laporan keuangan terdiri dari atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan) (Wahyuningsih, dkk., 2018).

2. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35

- a. Menjelaskan tentang penyajian laporan entitas berorientasi nonlaba, kata “*Not For Profit*” diubah menjadi nonlaba
- b. Aset neto dibagi menjadi 2 yaitu aset neto dengan pembatasan dan tanpa pembatasan

- c. Informasi mengenai pendapatan dikurangi beban sama dengan surplus atau defisit disebut Laporan Penghasilan Komprehensif
- d. Jenis laporan keuangan terdiri atas Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (Maulana dan Rahmat, 2021)

2.8. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wahyuningsih, Karamoy, dan Afandy (2018)	Analisis Pelaporan Keuangan di Yayasan As-Salam Manado (Berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 101)	Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pada Yayasan As-Salam belum sesuai dengan PSAK 45 dan PSAK 101. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan oleh pengelola tentang mengelola keuangan.
2	Wiladatika dan Diantimala (2020)	Penerapan PSAK No. 45 Dalam Pelaporan Keuangan Panti Asuhan Yayasan Islam Media Kasih Tahun 2017	Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Panti Asuhan Yayasan Islam Media belum menerapkan pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK No.45 karena kurangnya pemahaman pengurus panti asuhan mengenai laporan keuangan nirlaba akan tetapi laporan keuangan Panti Asuhan Yayasan Islam Media Kasih sudah dapat

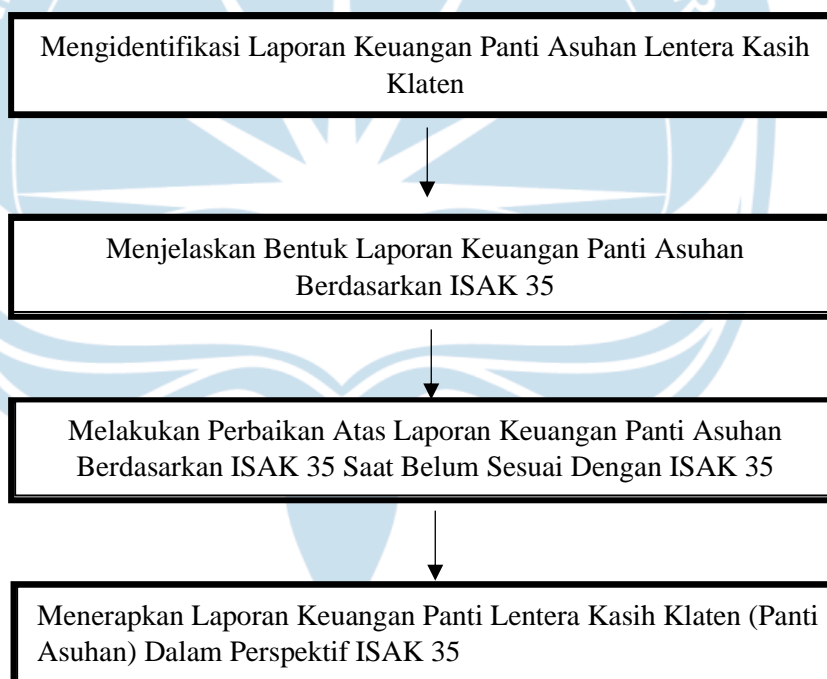
				dipertanggungjawabkan dan Transparan.
3	Juniaswati dan Murdiansyah (2022)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang Berdasarkan ISAK 35	Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Masjid Sabilillah Kota Malang belum dapat dikatakan akuntabel sepenuhnya karena belum menerapkan ISAK 35 dan Masjid Sabilillah masih belum dikatakan transparan karena belum memenuhi peraturan UU No. 28 Tahun 2004 yang dimana belum menerbitkan pada surat kabar jika memperoleh dana sejumlah Rp 500.000.000 atau lebih dalam satu tahun buku.
4	Diviana, dkk. (2020)	Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 pada Masjid Baitul Haadi	Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Masjid Baitul Haadi belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Padahal organisasi ini memperoleh dana yang cukup besar baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Laporan yang disajikan hanya secara sederhana saja, hanya mengurangi uang masuk dengan uang keluar saja.
5	Maulana dan Rahmat (2021)	Penerapan ISAK No. 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas	Kualitatif Deskriptif	Pencatatan keuangan Masjid Besar Al-Atqiyah menggunakan metode yang sederhana, pencatatannya dilakukan dengan metode basis kas. Dan

		Berorientasi Nonlaba pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa	penyusunan laporan keuangannya belum sesuai dengan standar keuangan yang berlaku.
--	--	--	---

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.9. Kerangka Pemikiran

Pembahasan pada penelitian ini digambarkan pada ilustrasi bagan sebagai berikut :



Gambar 2. 8 Kerangka Pemikiran

Penjelasan atas gambar tersebut, sebagai berikut:

1. Pertama, peneliti mencari atau mencatat informasi mengenai laporan keuangan pada Panti Asuhan Lentera Kasih Klaten.

2. Kemudian, menjelaskan bagaimana itu konsep laporan keuangan yang menggunakan ISAK No.35, baik itu dari segi informasi maupun cara pengerjaannya.
3. Selanjutnya, peneliti melakukan perbaikan atas laporan keuangan yang mana pada Panti Asuhan Lentera Kasih Klaten belum menerapkannya yaitu sesuai ISAK No.35.
4. Terakhir, peneliti menerapkan bagaimana cara membuat laporan keuangan organisasi nirlaba dalam hal ini laporan keuangan Panti Asuhan Lentera Kasih Klaten yang berdasarkan ISAK 35.

